



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2010 serta untuk menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2010.

(2) RKPD.....

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan pertimbangan :
  - a. merupakan rencana tindak atas upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
  - c. bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2011;
  - b. acuan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan;
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011;

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2011 Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

### **Pasal 4**

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi melalui Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5.....

**Pasal 5**

Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD Tahun 2011 dengan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Juni 2010

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Juni 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**AGUSSALIM PURBA**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

